

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PESISIR TANGGUH DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN TELUK NAGA

COASTAL VILLAGE PROGRAM IMPLEMENTATION IN TANJUNG PASIR VILLAGE TELUK NAGA

Leo Agustino
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
leoagustino@gmail.com

Abstract

Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) is a part of empowerment of marine and fisheries independent community national program. There are some problem on tough coastal village program in TanjungPasir village starting from Tangerang district fisheries and maritime officers' lack of preparedness, less representative in terms of planning, national program of community empowerment is not maximal, Tangerang district of marine and fisheries agency's weak control, less active of village government, and the weakness of program socialization. The purpose of this research is to find out how tough coastal village program implementation in TanjungPasir village. The theory which used is public policy implementation according to George C. Edward III. In this theory, there are 4 variables which affect public policy implementation's performance, those are communication, resources, disposition, and bureaucracy's structure. The method that used in this research is qualitative descriptive method. The result of this research is that tough coastal village implementation program in TanjungPasir village has not gone well and effective because of some factors, such as less massive communication, so part of society do not know the program, less of facilities and infrastructure so not all of society feel the impact of the program, disposition deficient so there is commercialization program indication, up to the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) on coastal group society.

Keywords: Policy Implementation, Tangguh Coastal Village Program, Coastal Area, & Coastal Communities.

Abstrak

Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan bagian dari program nasional kelautan dan para nelayan. Ditemukan beberapa masalah di Desa Pesisir Tangguh di desa Tanjung Pasir; Tangerang, kawasan nelayan dan petugas maritim yang kekurangan persiapan, kurangnya representasi dalam perencanaan, program nasional untuk menguasai masyarakat yang tidak maksimal, daerah kelautan Tangerang juga nelayannya yang lemah akan pengawasan, kurang aktifnya pemerintah daerah, serta lemahnya sosialisasi program. Tujuan atas riset ini ialah untuk mencari tahu bagaimana implementasi program desa pesisir tangguh di Tanjung Pasir. Teori yang digunakan ialah kebijakan implementasi umum menurut George C. Edward III. Dalam teorinya, terdapat empat variabel yang berdampak pada performa kebijakan implementasi umum: komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil atas riset ini menunjukkan bahwa program implementasi desa pesisir tangguh di Tanjung Pasir tidak berjalan dengan baik dan efektif yang mana disebabkan oleh beberapa faktor; kurang lancarnya komunikasi, maka sebagian masyarakat tidak paham akan program yang diberikan, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, maka tidak semua masyarakat merasakan hasil dari program tersebut, kurangnya disposisi yang mengakibatkan adanya indikasi program komersialisasi, sampai dengan tidak adanya prosedur operasi standar (SOP) dalam kelompok masyarakat pesisir.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Desa Pesisir Tangguh, Wilayah Pesisir, & Masyarakat Pesisir.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) atau disebut juga dengan istilah negara maritim. Dalam kata lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kawasan pesisir. Menjadi negara kepulauan atau maritim tentu membuat Indonesia memiliki potensi kelautan yang begitu besar. Banyak potensi yang dimiliki dari laut, di antaranya: penangkapan ikan, tambak ikan, mangrove, dan pemanfaatan tanaman laut, serta masih banyak lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat, khususnya para nelayan, dapat memperoleh manfaat dari aspek kelautan tersebut.

Sumber daya alam yang melimpah di kawasan pesisir seharusnya seirama dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pada kenyataannya, banyak permasalahan yang justru terjadi pada masyarakat pesisir, antara lain: kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan warga, kesehatan, minimnya fasilitas umum, dan faktor alam yang tak menentu. Dalam konteks ini, desa-desa pesisir di Indonesia selalu dihadapkan pada empat permasalahan pokok, yaitu: (i) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, (ii) kerusakan sumber daya pesisir, (iii) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, dan (iv) minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa (<https://m.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah> 14 oktober 2016)

Berlandaskan permasalahan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi suatu kegiatan yang mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia. Salah satunya adalah Pengembangan Program Desa Pesisir Tangguh yang disingkat menjadi PDPT, sekaligus merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan melalui bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana.

Program DPT ini dilaksanakan di 16 kawasan pesisir kabupaten/kota yang ada di Indonesia, dan dibagi menjadi 4 regional, yakni: Regional I: Kabupaten Asahan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Pontianak; Regional II: Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten

Parigi Moutong; Regional III: Kota Bau-Bau, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pacitan; dan Regional IV: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tangerang.

Adapun yang menjadi tujuan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh adalah (<http://pdpt-kkp.org2013/Sekilas-pdpt/tujuan.htm> 5 November 2016):

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di desa pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
4. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di desa pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berkait dengan tersebut di atas, program DPT merupakan program nasional KKP, namun dalam hal pelaksanaannya, program tersebut dilimpahkan kepada daerah yang tidak terjangkau oleh pemerintah Pusat. Adapun, anggaran dana untuk pelaksanaan Program PDPT adalah Rp. 800 juta per desa, sedang pencairannya dilakukan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada rekening Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP).

Sementara, penentuan lokasi yang menjadi sasaran Program DPT dilakukan dengan sekurang-kurangnya memenuhi tiga kriteria berikut: (i) Lokasi rawan bencana dan perubahan iklim; (ii) Mempunyai potensi ekonomi lokal unggulan; (iii) Masyarakat pesisir miskin namun potensial aktif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupannya; (iii) Kondisi lingkungan permukiman kumuh; (v) Terjadi degradasi lingkungan pesisir; dan/atau (vi) Tingkat pelayanan

dasar rendah (<http://pdpt-kkp.org2013/sekilas-pdpt/kriteria-lokasi.htm> 4 Maret 2017).

Adapun, salah satu daerah yang mendapat program tersebut adalah pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang beribukota di Tigaraksa. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan yang dibagi atas 251 desa dan 28 kelurahan; dari 29 Kecamatan, hanya 7 kecamatan yang berada di wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi (Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2015).

Dari tujuh kecamatan pesisir tersebut di atas, maka, hanya 3 (tiga) desa, yaitu Desa Tanjung Burung, Desa Muara, dan Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, yang menjadi locus program Program DPT. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedang teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Agustino 2016: 136-141). Menurutnya, terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III, variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Lebih lanjut, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Mengingat, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur ketatalaksanaan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga, terjadi distorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima

oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Walau ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, namun, pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai.

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Sebab, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Adapun, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, mengingat, yang diperlukan adalah jumlah staf dengan keahlian dan kemampuan yang mumpuni (kompeten dan kapabel) di dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, terdapat dua bentuk informasi, yakni pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang dilakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan

an dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh atau tidak.

- c. Wewenang; pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politis. Ketika wewenang itu nihil, maka, di mata publik kekuatan para implementor menjadi tidak terlegitimasi, sehingga, dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Namun, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka, sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi, di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya diri kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Walau implementor memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, Namun, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka, implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendektan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, akan tetapi, juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal hal penting yang perlu dicermati pada variabel

disposisi ini adalah:

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi yang mengerti akan kepentingan warga.
- b. Insentif; Edward menyatakan, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan sendiri, maka, memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan sangat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan --- dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu, mungkin, akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut akan adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka, hal ini akan menyebabkan pelbagai sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Oleh sebab itu, dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan

melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan pelbagai kegiatannya pada tiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sementara, pelaksanaan fragmentasi adalah upaya peyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

Pembahasan dan Hasil

Deskripsi hasil kajian adalah merupakan suatu data dan fakta yang penulis dapatkan langsung dari lapangan, serta disesuaikan dengan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III (dalam Agustino 2016: 136-141). Dalam teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu: (i) Komunikasi, (ii) Sumber daya, (iii) Disposisi, dan (iv) Struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan penulis, maka, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program DPT di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut: *Pertama*, bahwa proses komunikasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya Program Desa Pesisir Tangguh, karena kurangnya sosialisasi. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak bisa menikmati dan berperan aktif dalam menyukseskan Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir. Secara tegas dapat dikatakan, proses komunikasi intensif hanya terjadi di tataran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang, Kepala Desa dan Staff Tanjung Pasir, serta Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) saja.

Mengenai komunikasi program yang tidak berjalan baik terungkap dari hasil wawancara dengan Marudin (nelayan Desa Tanjung Pasir), pada 6 April 2017, di Pantai Tanjung Pasir Marudin. Hal senada juga diutarakan oleh beberapa nelayan Desa Tanjung Pasir. Menurutnya:

“... waduh saya sendiri enggak tahu apa itu PDPT mas, boro-boro ada sosialisasi, saya saja belum pernah dengar PDPT itu apa. Jadi, di sini kami tidak tahu adanya PDPT di Tanjung Pasir.”

Berdasarkan wawancara tersebut di atas,

maka, tampak dengan jelas betapa proses komunikasi Program Desa Pesisir Tangguh belum berjalan dengan baik. Begitu pun tidak sampai pada titik terang, karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang program tersebut. Di antaranya, Marudin yang tidak bisa menikmati program yang sudah berjalan. Hal senada juga diutarakan oleh Masudi (Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI)), yang diwawancarai di Desa Tanjung Pasir, pada 6 April 2017:

“Program desa Pesisir Tangguh sendiri kurang sosialisasi kepada masyarakat mas, soalnya PDPT mah dilimpahkan langsung ke kelurahan, ada juga program buat nelayan berupa kartu asuransi kematian yang disosialisasikan pada 2016 kemarin. Jadi, PDPT kurang komunikasi pada masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa proses komunikasi Program Desa Pesisir Tangguh, di Desa Tanjung Pasir, belum mencapai titik terang karena kurang sosialisasi. Karena, tidak semua masyarakat mengetahui dan merasakan program yang dijalankan, adapun, program bantuan kartu asuransi kematian untuk nelayan di luar dari Program Desa Pesisir Tangguh.

Kedua, sumber daya Program Desa Pesisir Tangguh, di Desa Tanjung Pasir, belum berjalan dengan semestinya. Sebagian dari masyarakat belum merasakan MCK/pengadaan air bersih yang ada pada Program desa Pesisir Tangguh. Mengingat, MCK/pengadaan air bersih hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat, khususnya elit Kelompok Masyarakat Pesisir yang mengerjakan Program Desa Pesisir Tangguh.

Elia, Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang usaha kerupuk, dan Sahada, Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang MCK/pengadaan air bersih, memaparkan:

“Iya ada sih mas, dananya dari Dinas Kelautan, kalo MCK langsung dari SBY yang datang ke sini. Kalau saya kan usaha kerupuk sama SPAL yah dapet anggarannya Rp. 25 juta kalo SPAL Rp. 40 juta. Itu juga enggak sekaligus sih, kalau enggak salah, kaya'nya, dikasihnya per 4 bulan sekali. Dana segitu ya dirasa cukuplah.”

Untuk sumber daya manusia sih alhamdulillah, sudah mematuhi segala aturan dari pemerintah mas. Jadi begitu uang turun ya langsung kita kerjain. Terus sarana dan prasarana mah sebelum

bikin proposal juga kita menanyakan terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan, jadinya ya sudah cukup menunjanglah” (wawancara dengan Elia pada 6 April 2017 di kediamannya).

Sementara, keterangan Sahada, Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang MCK/pengadaan air bersih, adalah seperti berikut:

“... setiap periode dana cair di penghujung tahun mas, dana yang keluar kalau tidak salah per 4 bulan sekali dan kalau di total itu Rp. 40 juta. Rasanya sudah cukup walaupun harus banyak yang harus diperhatikan. Untuk sumber daya manusia sendiri sih sudah sesuai aturan yang ada, misalnya, dana turun ya langsung kita kerjakan. Kalau sarana dan prasarana, semuanya sudah dalam bentuk uang. Jadi sudah menunjang. Palingan nanti untuk biaya perawatan dan “token” bulanan saya tarik Rp. 1000 dari warga.”

Berdasarkan wawancara tersebut, tampak betapa sumber daya untuk menunjang pelaksanaan Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir sudah cukup baik dan memadai. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan program usaha kerupuk yang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 25 juta --- yang kemudian dikelola oleh masyarakat untuk dibelanjakan alat serta bahan pembuatan kerupuk yang nantinya dijual di pasar dan hasilnya kembali dibagi kepada masyarakat yang telah mengikuti proses pembuatan dan pemasaran kerupuk. Sementara, untuk pembuatan MCK/pengadaan air bersih mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 40 juta untuk keperluan pengeboran dan pembuatan tandon air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah warga sekitar. Secara keseluruhan, sumber daya finansial sudah cukup memadai. Begitu juga sumber daya manusia yang ada sudah cukup memadai, baik itu jumlah sampai proses pengerjaan langsung ketika dana sudah mulai turun. Sementara, sarana dan prasarana sudah cukup baik dengan adanya Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir. Hal tersebut karena dana yang memadai, sehingga, proses pembuatan sarana dan prasarana pun menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Ketiga, disposisi atau sikap dari pelaksana Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir sudah cukup baik dan efektif. Hanya saja, masyarakat tidak menghendaki adanya biaya tambahan dalam operasional program. Sebagaimana pengadaan air bersih, dari kegiatan yang sudah di-

anggarkan, ternyata, aparat Desa dan KMP masih memungut biaya lain lagi.

Selanjutnya, disposisi pun sudah berjalan cukup baik sampai pada tahap eksekusi program. Hal tersebut dipaparkan Elia, Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang usaha kerupuk, dan Sahada, Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang MCK/pengadaan air bersih. Berikut pemaparan Elia, Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang usaha kerupuk:

“Iya ... masyarakat hanya iya saja karena memang sudah percaya. Kami setuju dengan tujuan program karena semuanya jelas, seperti dana sekian maksudnya pun jelas. Palingan untuk enggak samanya mah pas rapat saja sih, tapi pas program jalan mah lancar karena sudah dibahas di-rapat.”

Berikut pemaparan Sahada, Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang MCK/pengadaan air bersih:

“Iya sih sudah sadar, bahkan kami bersyukur ada PDPT di Tanjung Pasir. Walau mulanya masyarakat bertanya-tanya, akhirnya, setelah saya kasih penjelasan mereka pun menerima. Iya ... kita setuju sama tujuan programnya, malahan, kita berterima kasih ada PDPT. Antara pemerintah sama masyarakat sih sudah oke, palingan permasalahannya sih masyarakat pengennya gratis. Padahal, kalau mesin rusak harus dibetulkan dan untuk mengalirkannya pakai token, makanya, masyarakat harus bayar Rp. 1000 per hari.”

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, tampak, sikap dari pelaksana program sudah cukup baik. Buktinya, masyarakat menganggap program ini baik dan menguntungkan sehingga mereka dapat menerimanya dengan baik pula. Permasalahan yang timbul dalam teknis program adalah dari masyarakat yang enggan membayar biaya pengaliran air Rp. 1000 per hari, sehingga terjadi pemutusan aliran bagi yang menunggak. Apalagi, ada beberapa masyarakat yang menunggak pembayaran sampai tiga bulan.

Keempat, Struktur Birokrasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir sudah cukup baik dan efektif. Sayangnya, Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) tidak memiliki *Standar Operating Procedures* (SOPs). Akibatnya, masyarakat selalu menunggu arahan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang, atau dari pihak Desa Tanjung Pasir. Akibatnya,

dalam pelaksanaannya, program sedikit bias. Dengan kata lain, tidak ada target khusus untuk pelaksana tataran Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Desa Tanjung Pasir.

Walau tidak memiliki SOP, namun, dalam pelaksanaannya tidak ada kendala sama sekali. Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang usaha kerupuk, dan Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang MCK/pengadaan air bersih. Menurut Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang usaha kerupuk, adalah:

“... tidak ada kendala pada struktur karena semua adalah merupakan hasil musyawarah. Tidak ada SOP dalam melaksanakan program, karena usaha kerupuk menyesuaikan waktu ibu-ibu di sini. Iya ... semuanya sudah baik dan bersinergi, karena sebelumnya telah saling ngobrol di antara satu kelompok dengan yang lain.”

Sementara, menurut pemaparan dari Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir bidang MCK/pengadaan air bersih adalah sebagai berikut:

“[E]nggak ada kendala sih kalo masalah struktur, malah masyarakat sendiri menginginkan saya untuk jadi Ketua Kelompok Masyarakat sini.

Kalau SOP sendiri, di KMP tidak ada, yang penting duit cair ya ... kita kerjakan. Kan ada anggotanya yah ... anggota satu dengan yang lainnya ngobrol, jadi ... semuanya sudah bersinergi dengan baik.”

Berdasarkan wawancara tersebut, tampak dengan jelas, walau tidak ada kendala dalam struktur yang ada karena memang dibentuk dalam musyawarah sehingga dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Selaras dengan itu, tidak adanya *Standar Operating Procedures (SOPs)* dalam tataran Kelompok Masyarakat Pesisir karena memang pihak Desa membebaskan masyarakat untuk menjalankan program yang sudah diberikan. Salah satunya program usaha kerupuk yang menyesuaikan waktu ibu-ibu yang ada disekitar Desa Tanjung Pasir, kemudian teknis pembuatan MCK/pengadaan air bersih yang langsung dikerjakan ketika uang dari Pemerintah Pusat turun. *Keempat* variabel penilaian Program DPT di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang (yang merujuk pada teori Edward III) dapat disederhanakan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Temuan Lapangan

NO	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN	HASIL
1	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, 2. Komunikasi belum mencapai pada titik terang, 3. Komunikasi hanya bermuara pada <i>stake holder/implementor</i>. 	Kurang Baik
2	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak disebutkan jumlah nominal pasti anggaran program dari pihak Pemerintahan, 2. Sumber manusia yang sudah memadai untuk pelaksanaan program, 3. Sarana dan prasarana yang cukup baik setelah ada program, 4. Sebagian masyarakat tidak dapat menikmati dampak dari program. 	Kurang Baik
3	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap yang sudah baik dari pihak implementor, 2. Adanya indikasi komersialisasi pada hasil program yang ada. 	Cukup Baik

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Temuan Lapangan

NO	INDIKATOR	TEMUAN LAPANGAN	HASIL
4	Struktur Birokrasi	1. Tidak ada resistensi dalam pembentukan struktur, 2. Tidak adanya SOP pada tataran KMP, 3. Adanya diskresi program dalam pelaksanaan program oleh KMP.	Kurang Baik

Sumber: Penulis (2017)

Simpulan

Umumnya, implementasi Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, berjalan kurang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangnya (perhatikan Tabel 1). Oleh karena itu, seyogianya, komunikasi dengan cara mengundang seluruh masyarakat lebih ditingkatkan sehingga mereka mafhum dapat menerima program tersebut dengan baik.

Selanjutnya, agar tepat sasaran, maka, finansial seharusnya dikontrol langsung oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, selain itu, sarana dan prasarana harus diperbanyak agar seluruh masyarakat Desa Tanjung Pasir, dapat merasakan hasil Program Desa Pesisir Tangguh yang berjalan di Desa Tanjung Pasir.

Selanjutnya, pada tataran Kelompok Masyarakat Pesisir yang merupakan pelaksana program memiliki *Standar Operating Procedures* (SOPs) agar program tidak bias dan mencapai target yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, maka, perlu ditanamkan jiwa sosial yang tinggi pada pelaksana program (*implementor*) agar dapat berjalan agar tidak dikomersialisasi oleh segelentir orang.

Tempo 2013, *Masyarakat Pesisir Hadapi Empat Masalah* (dikutip pada 14 oktober 2016).

Internet;

<http://pdpt-kkp.org/tangguh/index.php/sekilas-pdpt/tujuan> (dikutip pada 5 November 2016).

<http://pdpt-kkp.org/tangguh/index.php/>(dikutip pada 5 November 2016).

<http://odhosuka.blogspot.co.id/2012/11/definisi-diskresi-sebagai-wewenang.html?m=1>, (dikutip pada 30 April 2017).

<https://tangerangkab.bps.go.id/index.php/publikasi/2015-11-02> (dikutip pada 14 Oktober 2016).

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Miles, M.B., dan Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.